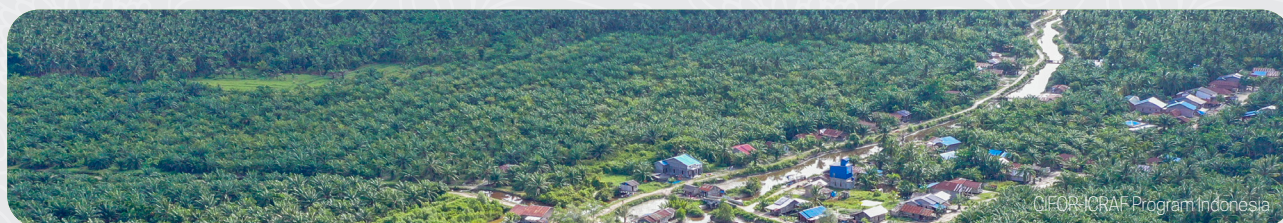


Sudahkah tercapai keseimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan?

Dukungan lembaga terhadap pengembangan agroforestri dan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan

Penyusun: Tri Sulistyati Widyaningsih¹⁾, Sanudin¹⁾, Eva Fauziyah¹⁾, Ary Widiyanto¹⁾, Syafrudin Syafii²⁾

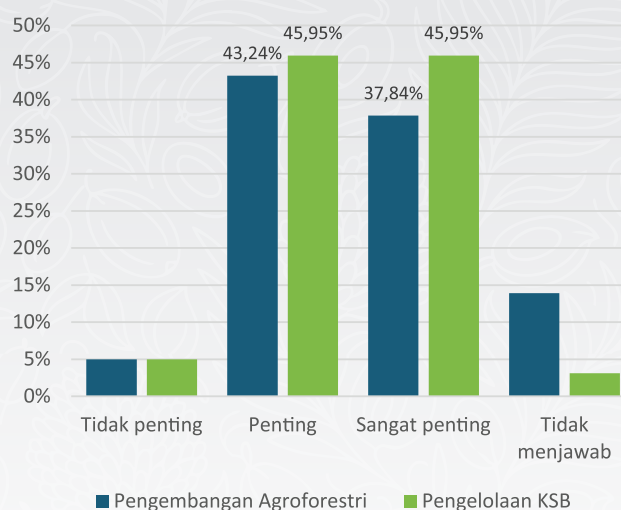
¹⁾ Masyarakat Agroforestri Indonesia; Pusat Riset Kependudukan BRIN; ²⁾ Fasilitator Lapangan SFITAL



Kepentingan lembaga terhadap pengembangan agroforestri dan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan

Keberhasilan suatu program perlu didukung oleh berbagai pihak baik lembaga pemerintah, lembaga usaha, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, dan lain-lain termasuk untuk pengembangan agroforestri dan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan (KSB). Hasil studi The Sustainable Farming in Tropical Asian Landscapes (SFITAL) terhadap informan penelitian yang berasal dari 37 lembaga yang dipilih secara *purposive* dan *snowball sampling* menunjukkan mayoritas kepentingan lembaganya terhadap pengembangan agroforestri berada pada tingkat penting (43,24%), sedangkan terhadap pengelolaan KSB dianggap sangat penting dan penting masing-masing sebanyak 45,95% sebagaimana tertera pada Gambar 1. Alasan kepentingan lembaga terkait pengembangan agroforestri dan pengelolaan KSB tertera pada Tabel 1.

Kepentingan lembaga terhadap agroforestri dan KSB



Gambar 1. Tingkat kepentingan lembaga terhadap pengembangan agroforestri dan pengelolaan KSB

Sumber: Data primer, diolah 2024

Tabel 1. Alasan kepentingan lembaga terkait pengembangan agroforestri dan pengelolaan KSB

No	Tingkat kepentingan	Pengembangan agroforestri	Pengelolaan KSB
1	Tidak penting	Tidak berkaitan dengan tugas pokok fungsi lembaga.	Tidak berkaitan dengan tugas pokok fungsi lembaga.
2	Penting	- Menambah pendapatan petani sebelum sawit berproduksi. - Terkait dengan perubahan fungsi lahan, pengembangan lahan dan infrastruktur. - Upaya mengurangi dampak lingkungan dan pencegahan resiko bencana, dari sisi ekologi agroforestri lebih baik daripada sistem monokultur. - Mendukung sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).	- Menambah produktivitas lahan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit lebih tertata. - Terkait dengan pengembangan lahan dan infrastruktur. - Mendukung koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). - Membantu masyarakat karena kelapa sawit merupakan komoditas yang banyak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat termasuk petani.

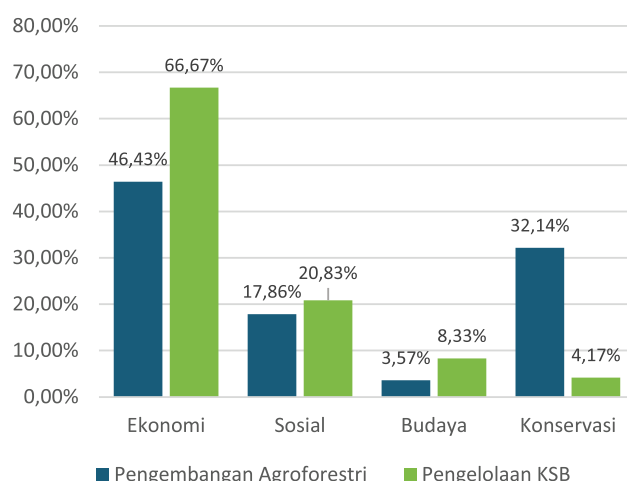
No	Tingkat kepentingan	Pengembangan agroforestri	Pengelolaan KSB
3	Sangat penting	Bagi pembangunan/ masyarakat: • Setiap pembangunan harus tetap menjaga lingkungan hidup. • Sebagai salah satu persyaratan sertifikasi ISPO. • Untuk meningkatkan pendapatan/nilai tambah pada saat sawit diremajakan. • Mengurangi efek gas rumah kaca. • Diversifikasi/keragaman pangan. Bagi lembaga: • Mendukung tugas pokok fungsi lembaga (Dinas Pertanian). • Mendukung misi utama lembaga (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK), untuk mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi (mendukung pelestarian sumber daya alam/SDA, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat).	Bagi pembangunan/ masyarakat: • Perbaikan tata kelola perkelapasawitan. • Terjaminnya suplai kelapa sawit untuk industri yang juga berdampak pada tercukupinya kebutuhan sawit skala nasional. • Peningkatan citra sawit Indonesia. • Membuka peluang inovasi. • Mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. • Memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. • Mendukung sertifikasi ISPO dan RSPO. • Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. • Meningkatkan peluang keberhasilan (pendapatan/produksi sawit/ manfaat untuk petani). • Pendapatan utama rumah tangga. Bagi daerah: • Komoditas utama Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) • Pendapatan utama daerah • Penyerapan tenaga kerja • Pemberdayaan masyarakat desa Bagi lembaga: Mendukung tugas pokok fungsi lembaga (Dinas Pertanian).

Sumber: data primer, 2024



Kepentingan mayoritas lembaga baik dalam pengembangan agroforestri maupun pengelolaan KSB adalah kepentingan ekonomi, pada pengembangan agroforestri sebanyak 46,43% dan pengelolaan KSB sebanyak 66,67% (Gambar 2).

Aspek kepentingan dalam pengembangan agroforestri dan pengelolaan KSB



Gambar 2. Aspek kepentingan lembaga terhadap pengembangan agroforestri dan pengelolaan KSB

Sumber: Data primer, diolah 2024

Dukungan lembaga dalam pengembangan agroforestri dan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan

Dalam pengembangan agroforestri maupun pengelolaan KSB, beberapa lembaga memiliki dukungan baik dalam bentuk kebijakan, dana, kerjasama/kolaborasi, tenaga, informasi, sarana prasarana, serta layanan perizinan sebagaimana tertera pada Tabel 2.

Beberapa lembaga selain mendukung pengembangan agroforestri, juga mendukung pengelolaan KSB sebagaimana tertera pada Tabel 3. Di Kabupaten Labura telah terbentuk kelompok kerja (pokja) KSB, namun dari lembaga yang ada dalam Surat Keputusan (SK) pembentukan pokja, sebagian lembaga tidak memiliki peran dan keterkaitan secara langsung dengan pengembangan agroforestri maupun pengelolaan KSB, hanya sebagai pendukung.

Tabel 2. Dukungan lembaga dalam pengembangan agroforestri

No	Bentuk dukungan	Lembaga pendukung
1	Kebijakan	
a	Penyusunan kebijakan yang mendukung penggunaan lahan secara berkelanjutan, termasuk mendukung agroforestri sebagai solusi untuk mengurangi deforestasi dan degradasi lahan (Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Penggunaan Lahan)	KLHK bekerja sama dengan kementerian lain
b	Program Kesatria untuk mengkombinasikan kelapa sawit tumpang sari dengan tanaman pangan.	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Labura
c	Perluasan areal tanam (PAT) termasuk untuk program penanaman tanaman pangan.	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Labura
d	Adanya beberapa Pusat Riset (PR) untuk mengembangkan agroforestri, misalnya PR Agroindustri, Hortikultura, Perkebunan, Biomaterial dan Bioproduk yang melakukan kajian dan penyusunan rekomendasi regulasi.	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
e	Mendorong kebijakan pelaksanaan jangka benah di lokasi pilot project Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Langkat Sumut.	Pusat Studi Agraria IPB
f	Perhutanan Sosial (PS) skema Hutan Kemasyarakatan (HKm).	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah V Aek Kanopan
g	Koordinasi perencanaan ekonomi dan SDA.	Bappeda Labura
h	Penanaman di pekarangan.	Dinas Pertanian melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
i	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan wilayah terbakar.	Dinas Pemadam Kebakaran Labura
j	Program Penanggulangan Bencana (PB) melalui sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).	BPBD Labura
2	Dana	
a	Anggaran pengembangan PS.	KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi Sumut, KPH Wilayah V Aek Kanopan
b	Dukungan dana untuk peningkatan kapasitas pekebun dan pembangunan kebun belajar pola agroforestri, dan lain-lain.	ICRAF melalui program SFITAL
c	Adanya alokasi dana penelitian meskipun tidak secara spesifik untuk pengembangan agroforestri.	BRIN
d	Alokasi dana melalui konsorsium bekerjasama dengan donor internasional.	Pusat Studi Agraria IPB
e	Alokasi dana untuk kegiatan pengukuran lahan.	Kementerian ATR/BPN/Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumut
f	Alokasi dana untuk pembangunan prasarana irigasi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Labura
3	Kerjasama/kolaborasi	
a	Pelaksanaan PS di dalamnya ada pengembangan agroforestri.	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, DLHK Provinsi Sumut, KPH Wilayah V Aek Kanopan
b	Kerjasama riset di bidang agroforestri.	BRIN bekerjasama dengan pihak lain

No	Bentuk dukungan	Lembaga pendukung
c	Kerjasama pelaksanaan kegiatan.	Pusat Studi Agraria IPB di level nasional bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian, KLHK, KPH, pemerintah daerah provinsi, pemerintah desa, NGO/CSO, kelompok tani hutan (KTH), dan masyarakat (<i>local champion</i>)
d	Kerjasama pelaksanaan pengukuran lahan.	Kementerian ATR/BPN/Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumut bekerjasama dengan stakeholder lain: perusahaan, masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/DLHK tingkat provinsi, dinas di tingkat kabupaten
e	Membantu penyelesaian jika terjadi konflik sengketa lahan.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Labura
f	Pembangunan kebun belajar, penyuluhan, dan penyampaian kembali informasi tentang agroforestri karena selama ini dianggap praktik pertanian lama yang sudah lazim dilakukan.	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) melalui PPL
g	Pelaksanaan kegiatan	PT GLP bekerjasama dengan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), DLHK Provinsi Sumut, DLH Kabupaten Labura, Dinas Pertanian (Bidang Perkebunan) Kabupaten Labura, perusahaan, dan masyarakat
4 Tenaga		
a	Adanya tenaga penyuluh untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan peningkatan kapasitas petani.	ICRAF, Dinas Pertanian, BPP, PPL, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS)
b	Menyiapkan penyuluh kehutanan serta tenaga pelatih/pendidik masyarakat dan petani tentang teknik agroforestri yang ramah lingkungan serta manfaatnya bagi keberlanjutan lingkungan dan perekonomian.	KLHK, KPH Wilayah V Aek Kanopan
c	Peneliti sebagai pendamping pada kegiatan pengembangan agroforestri/implementasi di lapangan.	BRIN
d	Sebagai fasilitator dan katalisator di lapangan.	Pusat Studi Agraria IPB
e	Sebagai pendamping empat kelompok: masyarakat adat, masyarakat lokal, buruh dan petani.	Sawit Watch
4 Informasi		
a	Hasil riset/kajian terkait agroforestri, menjadi penyedia data ilmiah.	BRIN, Pusat Studi Agraria IPB, Sawit Watch, PPKS, USU
b	Data wilayah yang sudah atau belum tersertifikasi.	Kementerian ATR/BPN/Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumut
c	Pemasangan papan informasi rawan bencana, himbauan kebakaran, data luas kebakaran hutan dan lahan.	BPBD Labura
d	Penyalur informasi dari pihak terkait kepada petani atau sebaliknya.	KPH Wilayah V Aek Kanopan
e	Data dan informasi jumlah pekebun, luas tanam, dan produksi tanaman.	BPP melalui PPL
5	Sarana prasarana	
a	Pemberian persetujuan atau izin kawasan untuk PS, penyedia lahan untuk PS.	KLHK, KPH Wilayah V Aek Kanopan
b	Teknologi yang dapat mendukung praktik agroforestri, misalnya sistem pemantauan hutan berbasis satelit atau teknologi pertanian presisi.	KLHK
c	Adanya sarana prasarana dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan agroforestri	BRIN
d	Penyedia bibit tanaman.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumut, Dinas Pertanian Labura
e	Proteksi alat pemadam kebakaran.	Dinas Pemadam Kebakaran Labura
f	Lahan untuk pembangunan kebun belajar.	Petani pemilik lahan
6	Layanan perizinan	

No	Bentuk dukungan	Lembaga pendukung
a	Pemberian bukti penggunaan atau kepemilikan lahan di tingkat provinsi.	Kementerian ATR/BPN/Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumut
b	Izin Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Labura
c	Membantu Kelompok Tani Hutan (KTH) memperoleh izin HKm.	KPH Wilayah V Aek Kanopan

Sumber: Data primer, 2024

Tabel 3. Dukungan lembaga dalam pengelolaan KSB

No	Bentuk dukungan	Lembaga pendukung
1	Kebijakan	
a	Program peremajaan sawit rakyat (PSR), program tumpang sari/tumpang sisip ternak sapi dan tanaman, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 3 tahun 2022 tentang pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.	Kementerian Pertanian, BPD PKS, PPKS, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pertanian Labura
b	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 525/5133/SJ tanggal 20 September 2021 tentang Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, sebagai salah satu cara untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inpres no. 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) tahun 2019-2024, di daerah.	Kementerian Dalam Negeri
c	Melakukan penelitian terkait kelapa sawit sebagai bahan penyusunan kebijakan (<i>Policy brief</i>) dan regulasi	BRIN, PPKS, Badan Penelitian dan Pengembangan Labura
d	Permentan No.38 tahun 2020 tentang ISPO.	Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
e	Permentan No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS).	Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
f	Pengendalian Deforestasi dan Konversi Lahan dengan: memastikan ekspansi perkebunan kelapa sawit tidak merambah kawasan hutan lindung atau hutan konservasi dengan penerapan kebijakan moratorium terhadap izin baru pembukaan lahan untuk kelapa sawit di kawasan hutan yang belum dikelola secara baik, program restorasi ekosistem dengan mendorong perusahaan kelapa sawit berpartisipasi dalam program restorasi lahan terdegradasi untuk memulihkan kawasan hutan yang telah rusak akibat aktivitas perkebunan.	Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, KLHK
g	Pemberi rekomendasi.	Sawit Watch
h	Mendorong ISPO sebagai kebijakan yang bersifat mandatory, dengan pendampingan intensif terhadap pekebun, khususnya terkait legalitas lahan sebagai syarat ISPO.	Pusat Studi Agraria IPB
i	Program sawit untuk rakyat (Prowitra).	PPKS
j	Program Neraca Penataan Guna Tanah (NPGT) sektor perkebunan tahun 2021.	Kementerian ATR/BPN/Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumut
k	Di Provinsi Sumatera Utara terdapat Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/343/KPTS/2018 yang meliputi Kelompok Kerja I Peningkatan Kapasitas Pekebun, Kelompok Kerja II Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Kelompok Kerja III Tata Kelola dan Mediasi Konflik, Kelompok Kerja IV ISPO dan Pemasaran Hasil.	FoKSBI Provinsi Sumatera Utara melibatkan unsur pemerintah, perusahaan perkebunan kelapa sawit, pelaku usaha, kelembagaan petani, akademisi, CSO, dan lembaga sertifikasi.
l	Koordinasi infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan ekonomi dan SDA.	Bappeda Labura
m	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan wilayah terbakar.	Dinas Pemadam Kebakaran Labura
n	Program Penanggulangan Bencana (PB) melalui sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) BPBD; pembuatan papan peringatan daerah rawan bencana.	BPBD Labura

No	Bentuk dukungan	Lembaga pendukung
2	Dana	
a	Alokasi dana untuk pelaksanaan Inpres No. 6 tahun 2019.	Kementerian Dalam Negeri
b	Adanya alokasi dana untuk penelitian.	BRIN, BDPKPS, PPKS, Badan Penelitian dan Pengembangan Labura
c	Alokasi anggaran untuk pembiayaan kegiatan terkait sawit (pendidikan, pelatihan, dan lain-lain); alokasi dana bagi hasil (DBH) sawit ke daerah.	BDPKPS
d	Alokasi dana melalui konsorsium bekerjasama dengan donor internasional.	Pusat Studi Agraria IPB
e	Alokasi dana untuk pendampingan masyarakat.	Sawit Watch
f	Adanya alokasi dana APBD untuk pendataan pekebun rakyat, penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), dan sertifikasi ISPO.	Dinas Pertanian Labura
g	Adanya alokasi dana untuk pembangunan akses jalan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Labura
h	Adanya alokasi dana desa yang menurut Permendes nomor 5 tahun 2015 dapat dimanfaatkan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) misalnya yang terkait kelapa sawit sesuai hasil musyawarah desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Labura
i	Adanya alokasi dana untuk pembuatan papan himbuan yang dipasang di desa-desa yang rawan bencana, banjir, dan longsor.	BPBD Labura
j	Alokasi dana untuk mendukung KSB	Perusahaan
3	Kerjasama/kolaborasi	
a	Terlibat dalam berbagai forum internasional dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang bekerja pada isu-isu keberlanjutan kelapa sawit global, termasuk inisiatif RSPO.	KLHK bekerja sama dengan sektor swasta dan LSM.
b	Kerjasama riset di bidang KSB.	BRIN dengan pihak lain, Badan Penelitian dan Pengembangan Labura
c	Kolaborasi dalam pelaksanaan RAN KSB bersama K/L terkait, kolaborasi pelaksanaan program PSR dengan K/L terkait dan dinas di daerah.	Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
d	Tergabung dalam Tim Pelaksana Nasional RAN KSB dan aktif di sekretariat nasional.	Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
e	Kerjasama pelaksanaan kegiatan.	Pusat Studi Agraria IPB di level nasional bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian (Cq. Deputi Pangan dan Agribisnis), Kemenlu (terkait kebijakan RED dan EUDR), Komite ISPO, pemerintah daerah provinsi/kabupaten, pemerintah desa, NGO/CSO, dan masyarakat (<i>local champion</i>); pada level internasional: UKCCU, UNDP, Wageningen University and Research, VHL Applied University, Solidaridad.
f	Kerjasama bahan tanam unggul untuk program pemerintah, swasta, dan rakyat, serta penyusunan kebijakan KSB.	PPKS dengan pemerintah Ditjen Perkebunan Kementan dan Dinas Perkebunan
g	Kerjasama dengan semua stakeholder pada semua level.	Sawit Watch
h	Pelaksanaan program.	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Labura dikoordinasikan melalui Bappeda Labura
i	Pembangunan kebun belajar.	Program SFITAL oleh ICRAF, MAFI, Dinas Pertanian Labura, kelompok tani
j	Kemitraan dengan perusahaan di Labura, fasilitasi dan pendampingan masyarakat dalam hal budidaya.	Dinas Pertanian Labura melalui dukungan Program SFITAL oleh ICRAF; BPP melalui PPL
k	Membantu menyelesaikan jika terjadi konflik sengketa lahan.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Labura
l	Dukungan dalam data dan pembuatan aplikasi.	Diskominfo Kabupaten Labura

No	Bentuk dukungan	Lembaga pendukung
m	Pelaksanaan kegiatan.	PT GLP bekerjasama dengan Ditjen Perkebunan Kementan, BPDPKS, DLHK Provinsi Sumut, serta OPD terkait di Kabupaten Labura (khususnya Dinas Pertanian)
4	Tenaga	
a	Pelatihan kepada petani sawit untuk menerapkan praktik KSB yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dengan teknik pengelolaan kelapa sawit yang mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan mendukung perlindungan tanah dan air.	KLHK
b	Peneliti sebagai pendamping dalam implementasi pengelolaan KSB di lapangan, menjadi penyuluh di tingkat pengambil kebijakan, pengusaha dan petani.	BRIN
c	Bantuan bagi tenaga pendamping di kabupaten untuk kegiatan PSR.	Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
d	Adanya tenaga penyuluh untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan peningkatan kapasitas petani serta penyelesaian permasalahan lapangan yang dihadapi petani dan kelompok tani.	ICRAF, Dinas Pertanian, BPP, PPL
e	Pendampingan masyarakat untuk percepatan ISPO.	Pusat Studi Agraria IPB
f	Sebagai pendamping empat kelompok: masyarakat adat, masyarakat lokal, buruh dan petani.	Sawit Watch
g	Penyuluhan kepada petani rakyat terkait kultur teknis, pelatihan/seminar terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit, kajian pelayanan kepada petani, PTPN, swasta dan lain-lain.	PPKS
h	SDM khusus pada bidang kemitraan terkait pengembangan KSB.	PT GLP
5	Informasi	
a	Penelitian dan pengembangan terkait KSB, penyebaran informasi melalui konferensi nasional dan internasional, menjadi penyedia data ilmiah.	BRIN, Pusat Studi Agraria IPB, Sawit Watch, USU, PPKS, Badan Penelitian dan Pengembangan Labura
b	Menyediakan data tutupan kelapa sawit berbasis spasial tahun 2019, 2021, dan 2023 serta data perizinan usaha perkebunan melalui aplikasi SIPERIBUN.	Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
c	Membuat database kelapa sawit Indonesia, membuat outlook komoditas kelapa sawit, menjadi lembaga pengujian kualitas kelapa sawit, serta menjadi landasan bagi perusahaan perkebunan melakukan replanting, pemupukan, pengendalian hama penyakit dan lain-lain.	PPKS
d	Sosialisasi tentang STDB.	Dinas Pertanian Labura
e	Pemasangan papan informasi rawan bencana, himbauan pencegahan kebakaran, data luas kebakaran hutan dan lahan.	BPBD Labura
f	Membantu menyediakan data petani/kelompok tani, mendata ulang kelompok, lahan dan lain-lain, daftar nama PSR (petani, lokasi, lembaga, nama pekebun), memberikan informasi bagi petani tentang KSB	BPP melalui PPL, kelompok tani
g	Menyediakan data yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang membutuhkan	PT GLP
h	Sebagai wali data.	Diskominfo Kabupaten Labura
6	Sarana prasarana	
a	Adanya sarana prasarana dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan KSB	BRIN, PPKS
b	Dukungan bantuan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit dan aplikasi database perizinan usaha SIPERIBUN.	Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, BPDPKS
c	Menghasilkan produk riset: bahan tanam unggul, pupuk hayati, produk mekanisasi, produk oleopangan, biodiesel.	PPKS
d	Pelatihan teknis budidaya, ISPO, dan pemetaan lahan	Dinas Pertanian Labura
e	Dukungan di bidang teknologi.	Diskominfo Kabupaten Labura
f	Proteksi alat pemadam kebakaran.	Dinas Pemadam Kebakaran Labura

No	Bentuk dukungan	Lembaga pendukung
g	Facilitasi penyampaian bantuan sarana produksi dan panen untuk pekebun (dari program PSR).	PPL
h	Sarana prasarana atau teknologi yang tersedia diarahkan atau didesain untuk mendukung KSB, khususnya pada aspek produksi.	PT GLP
i	Lahan untuk pembangunan kebun belajar.	Petani pemilik lahan
7	Layanan perizinan	
a	Pembentukan tim verifikasi untuk layanan perizinan usaha perkebunan berbasis risiko melalui aplikasi <i>Online Single Submission</i> (OSS).	Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
b	Izin Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Labura



CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Penutup

Tingkat kepentingan lembaga terhadap pengembangan agroforestri dan pengelolaan KSB tercermin dari dukungannya baik berupa kebijakan, dana, kerjasama, tenaga, informasi, sarana prasarana maupun layanan perizinan. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa berbagai lembaga dari berbagai sektor baik sektor publik, swasta dan nirlaba memiliki dukungan bagi pengembangan agroforestri maupun pengelolaan KSB, baik dilakukan secara mandiri oleh lembaga tersebut maupun bekerjasama dengan pihak lain.

Hal ini menjadi modal untuk terlaksananya program-program kegiatan agroforestri, KSB, serta agroforestri kelapa sawit. Pekerjaan rumah yang harus diselesaikan adalah menyeimbangkan kepentingan para lembaga yang selama ini dominan untuk kepentingan ekonomi, agar seimbang dengan kepentingan lainnya di bidang konservasi, sosial, dan budaya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka ruang dialog dan sinergi lembaga-lembaga terkait agar tujuan penerapan agroforestri sawit untuk mencapai pertanian berkelanjutan yang berdampak positif bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Widyaningsih TS, Sanudin, Fauziyah E, Widiyanto A, Syafii S. 2025. *Sudahkah tercapai keseimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan? Dukungan lembaga terhadap pengembangan agroforestri dan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan*. Bogor, Indonesia: CIFOR-ICRAF Program Indonesia; Jakarta, Indonesia: Masyarakat Agroforestri Indonesia; Pusat Riset Kependudukan BRIN (MAFI-BRIN).

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115 | [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia | Tel: +(62) 251 8625 415
Email: icraf-indonesia@cifor-icraf.org | www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia



#PekebunLestari | darikebunkelanskapsehat.id